BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Adat Merupakan adat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran baik dari dalam masyarakat adat itu atau dari masyarakat luar. “Hukum Adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa atau Negara dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*VOLKGEIST*) suatu masyarakat Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman”.¹

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan BPHN dan UGM tahun 1975 di Yogyakarta menyimpulkan :

1. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur-unsur agama;
2. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman;
4. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru;²

Sedangkan untuk ciri – ciri hukum adat ialah :

1. Tidak tertulis dalam perundangan atau disebut *unwritten law*
2. Tidak tersusun secara sistematis dan karenanya tidak dikodifikasi

¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 4, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 1

² I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10

3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
4. Tidak teratur dari segi isinya
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal – pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

Adat atau kebiasaan yang hidup serta berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun. “Oleh karenanya menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumban yang kecil saja”.³

Menurut Barend Ter Haar. B.Zn ”Delik (Pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari kelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi yang (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang)”.⁴

Maka untuk Unsur – unsur Delik atau pelanggaran adat ialah:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pemangku adat itu sendiri
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma – norma hukum adat
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi berupa sanksi adat

³Hilman Hadikusuma, *Hukum pidana adat*, Cet.2, Alumni, Tanjungkarang, 1984, hal.19

⁴Tolib, Op. Cit., hal. 319 .

Untuk membicarakan hukum pelanggaran adat selain pengertian dan unsur pelanggaran adat terlebih dahulu kita pahami tentang sifat pelanggaran adat Diantaranya ialah :

1. Tradisional *Magis Religius*

Artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan mengganggu keseimbangan masyarakat serta bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan agama.

2. Menyeluruh dan menyatukan

Artinya bahwa hukum adat tidak memisahkan antara delik yang bersifat pidana dan delik yang bersifat perdata, atau tidak dibedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran undang – undang.

Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya :

1. Kejahatan terhadap kepala adat
2. Pembakaran
3. Penghianatan
4. Obyek Hukum penyelewengan⁵

3. Tidak *PRAE EXISTENCE*

Artinya bahwa ada peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu ataupun belum ada sama sekali aturan hukumnya untuk diterapkan terhadap suatu delik yang terjadi apabila akibat perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat maka peristiwa atau perbuatan itu dapat dihukum.

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 314

4. Tidak Menyamaratakan

Artinya apabila terjadi pelanggaran adat maka hal yang perlu diperhatikan adalah timbulnya reaksi atau koreksi, terganggunya keseimbangan masyarakat serta pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan peristiwa dan perbuatannya.

5. Terbuka dan Lentur

Artinya hukum pelanggaran adat terbuka dan flexibel terhadap unsur – unsur baru baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan asal tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat.

Di Indonesia di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip - prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan pada tanggal 30 Septemebr 1999, sebagai pengganti undag – undang Nomor 5 Tahun 1967. Dengan diundangkannya undang – undang tersebut, segala ketentuan tentang Hutan dan Kehutanan tunduk pada undang – undang ini.

Pengertian Kehutanan menurut Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999, diatur dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa: Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, pengertian kawasan hutan adalah pengertian status hukum dari wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut, pengertian bahwa hutan merupakan ekosistem, dimana salah satu unsurnya adalah tanah beserta unsur -unsur biologis di atas dan di dalamnya, dapat dijadikan landasan bagi pembahasan kita mengenai pengaturan hutan adat di Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah banyaknya adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya masalah Hutan Adat Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menjaga Hutan Adatnya yang kelestariannya tetap dijaga dan dipertahankan, meskipun daerah itu sudah maju dan tampak sudah menjadi adat Aturan-aturan yang berbeda tersebut disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara. Sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi sesuai

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun hutan adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara, tetapi tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat, Sepanjang masyarakat adat pada kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan seperti yang di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hutan Adat dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan yang khusus dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dirusak. Pemanfaatannya dilarang atau dibatasi dengan aturan yang sangat ketat. Hutan Adat merupakan bentuk pengelolaan hutan yang memberikan peluang keterlibatan masyarakat secara luas dalam mengelola hutan. Undang – undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bab IX Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang – undang serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, Masyarakat hukum adat mempunyai hak menjalankan adat istiadatnya termasuk dalam mengelola sumberdaya hutan yang ada dalam wilayahnya. Desa Guguk merupakan salah satu desa tua yang terletak di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kehidupan masyarakat desa Guguk terikat dengan adat yang berdasarkan Islam yaitu “adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah, syarak mengato adat memakai” yang berarti adat berdasarkan syariat Islam dan syariat Islam berdasarkan kepada al-Qur’an. Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin adalah sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk 1.285 jiwa dan jumlah kepala keluarga 305 KK, dengan komposisi 668 laki – laki dan 617 perempuan. Sebagian besar masyarakat Guguk adalah masyarakat asli Melayu Jambi (Marga Pembarap) dan masih kental akan adat istiadat dan juga memiliki kekayaan alam berupa hutan adat yang dimanfaatkan masyarakat Desa Guguk untuk keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk. Hutan adat Desa Guguk adalah hutan yang dilindungi oleh hukum adat yang berada dalam wilayah tanah adat Desa Guguk di kawasan Bukit Tapanggung sesuai Piagam Lantak Sepadan oleh Sultan Anom Seri Negoro dari Kesultanan Jambi kepada Depati Pembarap pada hari Senin bulan Safar 1170 H dan terletak di sebelah selatan desa Guguk di pinggir sungai Merangin dengan luas 690 ha

Pada dasarnya Hutan Adat Desa Guguk menerapkan prinsip keseimbangan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masyarakat Guguk tetap lebih mengutamakan aturan dan larangan agar jangan sampai dilanggar dan sesuai

dengan seloko adat Hutanku, Adatku, Untukku artinya Hutan itu milik kita harus kita jaga dan lestarikan.

Di dalam ketentuan Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin :

1. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Desa Guguk Dimanfaatkan untuk Masyarakat Desa Guguk di masa Sekarang dan masa Mendatang
2. Untuk Keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk dapat mengambil kayu di kawasan hutan adat dengan syarat mengambil surat izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola dengan membayar bunga kayu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku
3. Untuk keperluan sendiri masyarakat boleh mengambil rotan dan manau dengan syarat mengambil surat izin dari Kepala Desa melalui kelompok pengelola dan membayar bunga kayunya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku
4. Masyarakat dapat mengambil buah – buahan dengan ketentuan tidak menebang dan merusak batangnya dan khusus untuk pohon durian ketentuannya tidak boleh dipanjat
5. Masyarakat dapat mengambil hasil hutan yang terkandung di dalam hutan adat dengan ketentuan harus meminta izin Kepala Desa melalui Kelompok Pengelola
6. Pemanfaatan Hutan Adat Guguk dalam bentuk pengambilan kayu untuk keperluan sendiri maupun fasilitas umum diwajibkan menanam 5 (lima) batang pohon setiap pengambilan 1 (satu) batang pohon⁶

Dari ketentuan adat di atas maka yang dapat merasakan manfaat dari hutan adat adalah Masyarakat Desa Guguk yang harus sesuai dengan ketentuan adat. Untuk keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk dapat mengambil hasil hutan yang terkandung dalam hutan adat seperti kayu, rotan dan manau di kawasan hutan adat dengan syarat mengambil surat izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola dengan membayar bunga kayu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Orang luar yang bukan masyarakat Desa Guguk tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu. Bahkan, bagi masyarakat Desa Guguk yang mengambil hasil dari hutan adat selain harus mendapatkan izin juga

⁶ Piagam kesepakatan Desa Guguk

dikenakan membayar bunga kayu (pajak atau sumbangan) sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat dapat mengambil buah-buahan dengan ketentuan tidak menebang dan merusak batangnya dan khusus untuk pohon durian ketentuannya juga tidak boleh dipanjat. Pemanfaatan hutan adat Guguk dalam bentuk pengambilan kayu untuk keperluan sendiri maupun fasilitas umum diwajibkan menanam 5 (lima) batang pohon setiap pengambilan 1 (satu) batang pohon. Dalam aturan Hutan Adat Guguk, apabila mengambil atau menebang pohon kayu baik yang diizinkan ataupun yang dilarang wajib mengganti dengan menanam kembali lima batang pohon setiap satu batang kayu yang diambil atau ditebang.

Pengambilan kayu dalam kawasan Hutan Adat Guguk selain harus mengikuti ketentuan tersebut di atas juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat pengambilan kayu di kawasan Hutan Adat Desa Guguk di antaranya berdiameter minimal 50 Cm atau dengan lingkaran 157 Cm diukur setinggi bahu orang dewasa (1,3 meter). Untuk kebutuhan pribadi/bangunan rumah diperbolehkan mengambil kayu maksimal sebanyak 3 (tiga) meter kubik dan dalam satu tahun diperbolehkan mengambil kayu dalam kawasan hutan adat Guguk maksimal 30 meter kubik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tidak diperbolehkan menebang kayu untuk dikomersilkan (dijualbelikan), tidak diperbolehkan menebang/mengambil kayu 25 meter dari kiri-kanan sungai dan 5 meter dari sungai besar dan tidak mengambil kayu yang merupakan pohon induk. Kelebihan kayu yang diambil diberikan kepada Kelompok Pengelola untuk dijadikan Kas Kelompok Pengelola.

Namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran adat berupa penebangan hutan adat Desa Guguk yang dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adat Desa Guguk yang bukan masyarakat Desa Guguk dan dalam hal ini pelaku melakukan penebangan kayu tidak sesuai dengan ketentuan adat dan tidak meminta izin terlebih dahulu. Hal ini merupakan pelanggaran adat berat menurut ketentuan Hukum Adat Desa Guguk dan harus di berikan sanksi sesuai isi Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat Desa Guguk.

Bentuk Reaksi atau koreksi

1. Penebangan , kerusakan atau pembakaran hutan secara liar
Denda 1 (satu) ekor kerbau
Beras 100 gantang artinya beras 250 kg
Kelapa 100 artinya 200 biji tali serta selemak semanis
2. Tidak boleh mengambil hasil hutan seperti rotan, manau, dan jenang
Denda 1 (satu) ekor kambing
Beras 20 gantang artinya beras 50 kg
Kelapa 20 tali artinya 40 biji beserta selemak semanis
3. Tidak boleh Berburuh satwa, burung dan mamalia lain yang dilindungi
Denda 1 (satu) ekor kambing
Beras 20 gantang artinya beras 50 kg
Kelapa 20 tali artinya 40 biji beserta selemak semanis⁷

Berdasarkan data terbaru dari ketua adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau jumlah pelanggaran adat atas penebangan hutan adat di Desa Guguk telah dilakukan dari tahun 1999 hingga agustus 2020 sebanyak 3 kali, diantaranya dua perorang, dan satu Perseroan Terbatas (PT) data tersebut dapat dilihat dari table berikut.

⁷Wawancara dengan Datuk Samsudin, Ketua Adat Desa Guguk, tanggal 26 Juni 2020.

Tabel 1
Penebangan Hutan Adat Desa Guguk

Nama dan tanggal pelanggaran	Sanksi yang di berikan	Jenis Pelanggaran yang dilakukan
1.PT Injepsin Tahun 1999	menyerahkan seekor kerbau kepada Ketua Lembaga Adat Desa Guguk	merambah hutan adat Desa Guguk seluas satu hektare
2.Bambang 18 April 2014	menyerahkan seekor kerbau kepada Ketua Lembaga Adat Desa Guguk	merambah hutan adat Desa Guguk seluas satu hektare
3.Inisial A Juli 2020	Selain seekor kerbau, masyarakat Guguk juga menjatuhkan denda berupa beras 250 gantang, 200 butir kelapa serta selemak semanis	menebang pohon tanpa izin di hutan adat Desa Guguk

Sumber lokasi: Kantor Desa Guguk

Sumber data: Ketua Adat Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap

Berdasarkan tabel diatas penulis menemukan ketidaksesuai pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat berupa penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin seperti pemberian sanksi kepada PT Injepsin pada tahun 1999 dan kepada bambang pada tahun 2014 yang hanya menyerahkan seekor kerbau kepada Ketua Lembaga Adat Desa Guguk sedangkan menurut aturan Hukum Adat Desa Guguk sesuai isi Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Selain seekor kerbau, masyarakat Guguk juga menjatuhkan denda berupa beras 250 gantang, 200 butir kelapa serta selemak semanis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik membahas masalah Pelanggaran Adat dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Pelanggaran Adat Atas Penebangan Hutan Adat Di Desa Guguk Kabupaten Merangin”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah pemberian sanksi pelanggaran adat atas penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin masih relevan?
2. Bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin terkait pelanggaran adat penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pemberian sanksi pelanggaran adat atas penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin masih relevan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin terkait pelanggaran adat penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya tentang pelanggaran adat berupa penebangan hutan adat di desa Guguk kabupaten merangin
- b. Sebagai Bahan acuan dan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dalam pelanggaran adat berupa penebangan hutan adat di desa Guguk kabupaten merangin.
- c. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mempermudah pemahaman maksud dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memperjelas pengertian dari istilah yang terdapat pada judul skripsi, antara lain :

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan

2. Pelanggaran Adat

Pelangaran Adat adalah suatu peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat⁸

3. Penebangan Hutan

“ Penebangan Hutan adalah suatu kegiatan atau perbuatan manusia untuk menebang pohon secara liar atau kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan ”

4. Desa Guguk

“ Desa Guguk ialah secara administratif berada di Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, sekitar 275 km sebelah barat Kota Jambi. Desa Guguk terletak di daerah berbukit dekat Sungai Merangin dan dilalui jalan propinsi yang menghubungkan kota Bangko (Ibukota Kabupaten Sarolangun- Bangko) dengan kota Sungai penuh (ibu kota Kabupaten Kerinci) dengan kondisi jalan aspal yang cukup baik. Pada bagian utara Desa Guguk berbatasan dengan Desa Muara Bantan, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Beringin dan areal HPH PT Injapsin, di bagian timur berbatasan dengan Desa Markeh dan di bagian barat berbatasan dengan Desa Parit. Desa Guguk terdiri dari 4 dusun - Guguk, Simpang Guguk, Marus dan Padang Kulim. Pusat pemerintahan Desa Guguk terletak di Dusun Simpang Guguk di mana sebagian besar sarana dan prasarana desa terdapat di sana. Semua dusun terletak di kanan-kiri jalan propinsi yang membelah desa, kecuali Dusun Guguk yang terletak di pinggir Sungai Merangin”.⁹

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1979, hal. 18.

⁹Putra, Defriani arif, MaulanaSyekh Qori Bangko Jambi .“*Hutan Adat Dalam Perspektif Islam; Studi Kasus Hutan Adat Desa Guguk Propinsi Jambi* .*Journal UIN*. Jakarta.2015

Dari uraian konsep di atas maka pengertian judul skripsi yang penulis maksud adalah penelahaan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat atas penebangan hutan adat didesa Guguk Kabupaten Merangin.

E. Landasan Teori

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latarbelakang masalah, maka landasan teori yang akan digunakan penulis sebagai acuan analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Kepastian hukum yang dikukankan oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1). Tersedia aturan – aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
- 2). Bahwa instansi – instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3). Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.

4). Bahwa hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5). Bahwa keputusan peradilan secara kongrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰

2. Teori Penegakan hukum

Pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat
2. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor dan keadaan secara proporsional
3. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai reflex nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

¹⁰Sidharta arif, *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hal.79-80

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data atau bahan untuk penulisan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan obyektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

2. Tipe atau Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui sampai dimana hukum bekerja didalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.

Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris Adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta - fakta hukum yang berlaku ditengah - tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta - fakta sosial yang ada dan hidup ditengah - tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat¹¹.

3. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa

Penelitian Deskriptif, yaitu mengemukakan penjelasan terhadap permasalahan dengan data yang selengkap-lengkapnyanya. Permasalahan yang dimaksud adalah tidak sesuainya pemberian sanksi terhadap

¹¹Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

pelaku pelanggaran adat atas Penebangan Hutan Adat Di Desa Guguk
Kabupaten Merangin

4. Sumber Data

Data dalam Skripsi ini diperoleh melalui :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survey lapangan dan berkaitan dengan perilaku masyarakat.

Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan para narasumber yang bersedia memberikan informasi terkait dengan tema Skripsi, yaitu :

1. Datuk Samsudin selaku Ketua Adat
2. Bapak Izazi selaku Kepala Desa Guguk Kabupaten Merangin
3. Bapak Sopian selaku Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat
Desa Guguk

b. Data Sekunder

- 1). Undang - Undang Pokok Kehutanan No 5 Nomor 1967 dan UU
No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Kehutanan
- 2). Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai
Manau Kabupaten Merangin
- 3). Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Hutan Adat
Desa Guguk Kecamatan Renap Pembarap Kabupaten Merangin

4). Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku atau library research terhadap peraturan adat tentang Penyelesaian Pelanggaran Adat, buku – buku karangan dan tulisan para ilmuwan dan ahli yang ada hubungannya dengan pokok pembasan skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku – buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis dalam pembahasan skripsi ini.

5. Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penebangan Hutan Adat Desa Guguk di Kecamatan Renah pembarap. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik penarikan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dapat dijadikan sampel. Kriteria informan yang diambil berdasarkan tingkat pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penebangan Hutan Adat Desa Guguk di Kecamatan Renah Pembarap, yaitu sebanyak 2 orang dan 1 Perseroan Terbatas (PT). Mengingat sedikitnya populasi, maka penulis akan menjadikan keseluruhan populasi tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini.

Serta 3 orang informan, yaitu:

- a. Kepala Desa Guguk
- b. Ketua Adat Desa Guguk
- c. Ketua Kelompok Pengelola Dan Pemelihara Hutan Adat Desa Guguk

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu instrument untuk mendapatkan data utama dalam menilai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali mengenai Penyelesain Pelanggaran Adat Atas Penebangan Hutan Adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tatap muka secara tersrukur dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden ketua adat dan kepala Desa Guguk.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil dan mempelajari data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yang ada di Desa Guguk Kabupaten Merangin

7. Analisis Data

Dari data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan ke dalam

bagian – bagian tertentu untuk selanjutnya dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang teliti mengenai objek penelitian. Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Penelitian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika

Untuk memperoleh gambaran secara jelas , rinci, dan utuh atas seluruh materi skripsi ini secara sistematis , dan untuk memudahkan dalam menghubungkan serta memahami anatara bab yang satu dengan bab yang lain , maka penulis menyusun sistematikannya sebagai berikut:

BAB I : Bab I Merupakan bab yang bersikan pendahuluan yang memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian,

kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Dalam bab II ini berisikan uraian mengenai Tinjauan umum tentang Pelanggaran adat ,pengertian pelanggaran adat, penebangan dan hutan adat.

BAB III : Dalam bab III ini berisikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat yang terdapat dalam sub bahasannya yang terdiri dari : Apakah pemberian sanksi pelanggaran adat atas penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin masih relevandan peran Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin terkait pelanggaran adat penebangan hutan adat di Desa Guguk Kabupaten Merangin ?

BAB IV : Dalam bab IV ini merupakan bab pentup yang berisikan kesimpulan dari bab yang dalam skripsi ini saling berkaitan satu sama lain sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat komperatif (meneyeluruh) yang menggambarkan secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan saran